

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PERDAGANGAN

Jalan: Pembangunan No. 6 Telp. (0517) 31024 Rantau Kodepos 71111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN NOMOR: 510/53.VSekt-DISDAG/2021

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN TAPIN,

Menimbang: a.

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin;

Mengingat: 1.

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;

KEDUA: Perubahan Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun

kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan

dokumen renstra;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau Pada Tanggal 19 Oktober 2021

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin,

H. HARLIANSYAH, SE, MM NIP. 19660203 199302 1 002 Lampinan Koputusan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Nomer : 510.05.\$Psets-DISOAG/2021 Tanggal : 19 Oktober 2021

IKU DINAS PERDAGANGAN

Elnaria Utama / Sosson Stratagis	Inelliator Courts Drawn		Penjelasan				D. C. C.
		Makin Indikator	Alasan Persilihan Indikator	Rumus Indikator	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
Meeingkatnya PDRB Sektor Perdagangan Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Mengedikaskan Pertumbukan Volume Perdagangan	Semakin tinggi pertumbuhan volume Perdagangan akan mencapai sasaran strategis penekonomian Kab. Tapin	Pertumbuhan volume Perdagangan diulur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB Ataa Dasar Hanga Kondan (ADHL) Sektor Perdagangan Ga PDRB 1. Dosar Hanga Kondan (ADHL) Sektor Perdagangan Ga PDRB1. DOSAR GA POSE Ga Laju pertumbuhan volume perdagangan PDRB1 = PDRB ADHK Sektor Perdagangan pada tahun n	Kepala Dinas	BPS Tapin	
Meningkatnya Pendagangan Daerah	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Menginditasikan perak sektor perdagangan terhadap PDRB	semakin besar peran sektor perdagangan akan memberikan Sektor Ekonomie <u>PDBB Sektor Perdagangan, x100%</u> kontribusi positif terhadap pendagangan PDRB	Sektor Ekonomie <u>PDBB, Sektor Pedagangan, x100%</u> Total PORB	Kabid P3	BPS Tapin	
ferciptanya Tertib Chaha pendagangan	Persentase peleku usaha yang diberikan rekomendasi Icin	Mengindikasikan banyaknya rekomendasi izn usaha yang diterbitkan	Semakin banyak rekomendasi bin usaha maka semakin meringkatkan rilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perdagangan	formish pelaku usaha yang memifiki rekomendasi izin usaha x 100%. Jumlah pelaku usaha	Kepala Seksi Perisinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rekap Permohoran Rekornendasi Izin Usaha	
Meningkatnya Pengebidaan Sistem Resi Gudang	Pertumbuhan jamiah resi gudang yang diterbitkan secara komulatif	Mengindikasikan persentase petani yang menerapkan Sistem Resi Gudang (SRG)	Semakin Meningkaraya Pengelolaan Satem Rusi Gudang (SRG) maka meningkadan Pertumbuhan Perdagangan dalam daerah	G= Jamlah Resid _ Jumlah Resig v2000% Jumlah Pesid G = Pertumbuhan jumlah resi gudang yang diterbitkan secara komulatif Jumlah Resid = Jumlah Resi pada tahun n - 3 Jumlah ResiG = Jumlah Resi pada tahun n - 3	Kepala Seksi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Dokumen Resi Gudang	
Meningkatnya Kualitas Pelaku Usaha Umuk Tertib Usaha	Cakupan Pembinaan pelaku usaha	Mengindikasitan banyaknya pelaku usaha yang dibina	Semakin banyak pelaku usaha yang dibina mala semakin meningkatnya terub usaha	lem ah pelaku usaha Jem ah pelaku usaha	Kepala Seksi Pembinaan Petaku Usaha Perdagangan	Data Pelaku Usaha	
Mengembangkan Usaha Perdagangan	Jumlah Pameran produk lokal yang diikut	Jumilah Pameran produk lokal yang dikuti Jurniah Pameran yang dikuti urtuk promosi produk lokal	pameran merupakan sarans untuk melakukan promosi		Kasi Pengembangan Perdagangan	laporan hasii pameran	
	Persentase Jenis Produk Lokal yang berpobinsi dipromosikan	Jumlah Jenis Produk lokal yang dipromos kan	Semakin banyak produk lokal yang dipromosikan makin besar peluang dikenal masyarakat		Kasi Pengembangan Pendagangan		
	Penantase pelaku usaha yang berpotensi Jumlah pelaku usaha Produk lokal yang dipromosikan dipromosikan	Junish pelaku usaha Produk lokal yang dipromosikan	Semakin banyak pelaku usaha produk lokal yang dipromosikan makin besar pekung dikenal maryarakat		Kasi Pengembangan Perdagangan		
Meniegkatnya kualitas Pelayanan bagi pedagang	(Buedep		Mengetahui tingsat kepuasan pedagang atas pelayanan yang diberikan perimerbitah	Hasil Survey Menurjukan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kepala Bidang Stabilisasi dan Hasil survey Sarana Distribusi Pendagangan	Hasil survey	
Pengembangan sarana distribusi pendagangan dikabopaten	Persentase bangunan patar yang memenuhi kriteria layak	Mengindikasikan kondisi bangunan pasar yang layak	Bangunan pasar yang layak dapat memberikan kanyamanan <u>lam sh bangunan pasar di kabupaten</u> bagi pedagang dan pembeli	lum'ah bangunan sasar di kabupaten jum'ah bangunan pasar di kabupaten	Kepala Bidang Stahilisasi dan Lapocan Pembangunan Serana Distribusi pasar Pendasansan	Laporan Pembangunan pasar	
Menjaga Kestabilan Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien variasi harga barang kebutuhan. Variasi Harga barang pokok dan pending pokok.	Variasi Harga berang polsok dan penting	Mengetahul tingkat kenaikan harga barang povok dan penting.	Rata-rata Variasi Hanga	Kepale Bidang Stabilisasi dan Husil Pendataan Huga Sarana Distribusi Bapok Bapok	Hasil Pendataan Harga Bapok	

Manufal Income (Persons Street, Stree	to different Warmer's Harmon		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3	The state of the s	
venera course / source security	indisaror vanerja Orama	Makna Indikator	Alesen Pernithan Indikator	Rumus hodikator	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
Tersedianya sarana distribusi perdagangan yang layak	Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun/diperbaiki	Jumlah Sarana dan presarana yang dibangun maupun diperbaiki	pemeliharaan dan pembangunan pasar bisa maningkatkan kelayakan pasar		Kepala Seksi Pembangunan Sarana Distribusi Pendagan	Laporan Pembangunan pasar	
Terlaksananya Kesmanan, Ketertiban dan Keberuhan Pasar	Jumlah Petugas Keamanan yang bertugas	Melakukan pengawasan terhadap kehadiran petugas keamanan dilingkungan pasar	Dengan udanya pengawasan kehadiran petugas keamanan maka semakin teratumya jadwal petugas keamanan		Kepala Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi	Jadwal Kegiatan Petugas Kesmanan	
	Jumlah Petugas Keberuhan yang bertugas	Melakukan pengawasan terhadap kehadran petugas Kebersihan dilingkungan pasar	Dengan adanya pengawasan kehadiran petugas Kebersihan maka semakin teratumya jadwal petugas keamanan		Kepala Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi	Jadwal Kegistan Petugas Kebersihan	
Tersedianya Data Penrewa Toko/Kos/Warung yang alurat	Jumlah Data Penyewa Toko/Klos/Los/ Wanung yang akurat	Menyajkan Data Penyewa Toko/Klos/Los/ Warung yang akurat	Tertibnya data Penyewa Toko/Kiss/Los/ Warung		Kepala Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi	Data Peryewa Toko	
Tersedianya informasi hanga Barang Pokiok dan Penting	Penentase Laporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Memberikan informasi banyaknya hari yang digunakan dalam monitoring hunga	Laporan Informasi Harga Kobutuhan Pokok dan Bahan Penting yang disajikan dan diapdate setiap harinya diharapkan dapat memberikan informasi terkisi bagi masyarakat	Jumish Tanje: hari isporan Jumish Tanje: hari isporan	Kepala Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting	Laporan Hasil Pendataan harga	
Terlaksananya Pengawasan Papuk Bersubskii	Persentase Penyaharan Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sesaran	Memberikan Informasi Kinerja Realisasi Pupuk	Berapa Realsasi Kebutuhan Pupuk Kelompok Tani	Realisasi Penyakuran Puouk Bersubsidi. Rencana Definitif Kebusuhan Kelompok TangROKK)	Kepala Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting	Dinas Pertanian	
Meningkarinya Kopatuhan pelaku usaha bidang metrologi legal	Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTIP) yang berlanda tera sah tahun berjalan	Mergindkasikan alut ukar, simbangan den periengkapannya (VTTP) yang mempunyai tanda tera sah	Semakin banyak alat ukur, tambangan dan perlengkapannya (UTTP) yang memounyai tanda tera sah maka terjaminnyai keberaran pengkakuran, kepastian hukum dalam penakaian satuan ukur, standar ukuran, metode penguluran dan penggunaan alat-olat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP)	Jumiah Alat UTTP vang, bertanda tera sah tahun berjalan × 100 % Tanget Alat UTTP tahun besjalan	Kepala Bidang Kemetrelingi dan Pengawasan Perdagangan	Dokumen hasil tera/ters ulang	
	Persentase Pelaku Usaha Bidang Metrokogi Legal yang memenuhi keterituan berlaku terhadap UTTP dan BOKT	Menggambarkan pelaku usaha metrologi legal yang memenuhi ketentuan	Melindungi konsumen agar tidak dingikan terhadap berang dalam kesebaan terbungkus (BDKT) dan kesesualan alat UTTP	<u>Jumish pelaku usaha bidana metrologi legal yang diawasi</u> Jumish pelaku usaha bidang metrologi legal yang diawasi	Kepala Bidang Kemetrologi dan Pengawasan Perdagangan	Dokumen Pengawasan	
Meningkatnya Kesessian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya tertudap ketentuan borlaku	Jumlah alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera	Menggambarkan Jumah atat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah	semakin banyak alat UTTP yang ditera maka torjaminya keakuratan alat tersebut		Kepala Seksi Kemetrologi	Laporan Hasil tera/fera ulang	
Pelaku Usaha dibidang Metrologi Legal yang dibina	Jumlah Polaku Usaha dibidang metrologi legal yang dibina	Meringkatkan kesadaran pelaku usaka atas keresuaian barang dalam keadaan terbungkus dan keakuretan alat UTTP	seesakin banyak barang dalam keadaan terburgkus (BDKT) dan alat UTTP yang sesual ketentuan maka mencegah kerugian konsumen		Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan	Laporan Pengawasan	
Meningsutkun Akuntabilitas Kinesja Dinas Perdagangan	Miai SAtziP Dinas Perdagangan	Meningkarnya Nilai SAXIP Dinas Perdagangan yaitu selish antar tahun sebelumnya dan tahun berikutnya	Sebagai evaluasi sekaligus pertavagangkwaban atas pelaksan-aan tugas dan fungsi Olnas Perdagangan yang dijebarkan dalam peleksanaan berbagai program kegiatan	Nika Kenaikan SAKIP = <u>Nikal Tahun N. Mika Tahun0</u> x 100% Nika Tahun1 = Mika SAKIP Tahun0 Nika Tahun2 = Mika SAKIP Tahun M.	Sekretaris		
Peliyanan Administrasi Keuangan	Persentase Penyerapan Anggaran	Penyerapan Anggaran menupakan selish antara realisasi keuangan dengan PAGU anggaran dalam satuan persen	Realisasi Keuango n menupakan tolak ukur dan pencapalan kinerja kegiatan yang diaksanakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan		Sekretaris		
Pelayanan Sarasa Praiarana Administrasi Persentase Aset Yang Torcabat Perkantoran		Mengindikasikan Penambahan Aset Pada Dinas Perdagangan	intuk penambahan ekultas sarana dan prasarana hingga nenjadi milik Dinas	Jumlah target Pengadian Aset × 100%	Sekretaris		
	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian ASN	Mengindikasikan ASN yang memprodes administrasi kepegawalannya	Agar diketahui berapa jumish ASH di kngkungan Diknas Perdagangan yang sada tahun berjalan memproses pada tahun berjalan memproses administrasi kepegawalan	Jumi ph ASN yang mem proses administras) × 100% Total Jumiah ASN yang memproses administrasi	Sekretaris		

Kinerja Utama / Sararan Strategis	Inditator (Creels Utama		Penjelasan				
	-	Makna Indikator	Alasın Pemilhan Indikator	Rums Inditator	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Jamlah dakumen kinerja sesual ketemban	Menyasun Perencanaan dan Pelaporan Jumlah dokumen kinntja sesual ketentuan Jamlah dokumen kinerja yang dihasilkan pada Kherja (Lahun betjalan	Dokumen merupakan bukti nyata dari pekerjaan yang telah dilaksanakan selama sahun berjalan. Dokumen adalah sebuah bentuk data-deta tertudis. Dokumen juga adalah sumber resmi yang dibuat dan dikelankan sieh finstansiyang dibuat dan dikelankan sieh sebuah hancan.		Kasubbag Prencanan dan Keuangan		
Mempasan Administrasi Kesangan	Jamlah Dokumen Laporan Kesangan secara berkala	Aumlah dokumen keuangan yang dihasilicin pada tahun berjalan			Kasinbag Pirencanan dan Keuangan		
Merencanakan dan mengadakan sarana Jamlah Aset yang tercalat dan pesarana serta administrasi: perkananan perkananan	Jumlah Aset yang tertatat	Jumlah dekumen terkait sarana dan prasarana	Dobumen sarana dan prasarana Dina. Pendagangan merupakan bukti administrasi yang tercatat sehingga bisa diketahui pengkisasihasian sarana dan prasarana tersebut		Kasubbag Unum dan Kepegawalan		
Merryusun data kepegawaian, erakuasi serta administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pelayanan surat menyurat	Jumlah dokumentasi pelayan surat menyarat tahan berjalan	Dolumentasi pelayarian surat menyurat dibuat agar diketahui seberapa bunyak surat menyurat pada tahun berjalan		Kasubbag Unum dan Repegawalan		
	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya diayani secara tentib	Jumlah pegawai yang administrasi Repegawalannya diayani secara terlib pada tahu Berjatan	Jumlah prograval yang administrasi Pelayanan dibenkan agar ASM dalam pengasulan kepegawalannya dilayani secara tertib pada tahun ladministrasi seperti hinnikan pangkat, tersilan gaji berjalan dengalan dalam pengalan pengalan seperti berjalan dalam pengalan dalam sebagai dalam dalam dalam dalam pengalan pengalan dalam		Kepagawalan Kepagawalan		



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PERDAGANGAN



RENSTRA

(Rencana Strategis) Tahun 2018 - 2023

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab, wajib mengindahkan prinsip-prinsip *Good Governance* (Pemerintah yang baik). Untuk mewujudkan *Good Governance* dituntut Aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat, bangsa dan negara yang kemudian diimplementasikan dengan kebijakan Nasional.

Kemudian untuk menetapkan pelaksanaan pembuatan renstra, ada dua dasar yang menajadi pedoman, pertama peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 dan permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Dengan selesainya Renstra 2018-2023 ini semoga dapat dijadikan pedoman dan Semoga Allah SWT selalu memberkahi kita semua. Amin Yaa Rabbal Aalamin.

> Rantau, Januari 2019 Kepala Dinas Perdagangan

Kabupaten Tapin,

Drs. H. Arifin Noor, M. AP Pembina Utama Muda

NIP. 19600821 198202 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	1-3
1.3. Maksud dan Tujuan	1-5
1.4. Sistematika Penulisan	1-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN	II-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan	II-1
2.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Pelengkapan	II-1
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan	II-3
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan	11-4
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas	
Perdagangan	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala	
Daerah Terpilih	III-1
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	III-3
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	
Strategis	III-6
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-7
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan
- Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin
- 3. Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Dinas Perdagangan
- 4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
- 5. Stratergi dan Kebijakan Dinas Perdagangan
- 6. Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
- 7. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin merupakan organisasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tapin, dibentuk oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin tanggal 3 Oktober 2016 dan Peraturan Bupati Tapin No. 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tanggal 02 Desember 2016. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tapin terbagi namanya menjadi Dinas Perindustrian Kab. Tapin serta Dinas Perdagangan Kab. Tapin dan bergabung dengan Dinas Pengelolaan Pasar Kab. Tapin.

Dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin untuk melaksanakan program Pembangunan jangka panjang secara berkesinambungan disegala bidang baik diperkotaan maupun pedesaan diwilayah Kabupaten Tapin, dalam usaha membantu kemandirian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang agamis, Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yaitu sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsinya yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas dibidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan, Bidang Kemetrologi dan Pengawasan Perdagangan, dan Sarana Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan.

Dinas Perdagangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian terutama pada sektor perdagangan. Bila kita melihat potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Tapin sangat dimungkinkan kontribusi sektor ini lebih ditingkatkan lagi, dalam mengantisipasi perkembangan pembangunan ekonomi Kabupaten Tapin Provinsi, sektor Perdagangan tetap menjadi tumpuan dalam peningkatan pendapatan nasional maupun regional. Keberhasilan sektor ini memerlukan dukungan sektor lainnya, disamping peningkatan kegiatan yang terkoordinasi dengan baik, seperti pemasaran produk dalam negeri dan ekspor. Daya saing industri dan perdagangan, sehingga dapat terjamin kelancaran arus barang dan jasa, terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, terbentuknya harga yang wajar serta terhindar dari ekonomi biaya tinggi, dan yang terpenting adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor perdagangan serta berusaha mencapai target penerimaan dari retribusi pasar

yang telah ditentukan, juga berusaha menggali sumber-sumber penerimaan lain dalam rangka memberikan kontribusi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Tapin sesuai dengan VISI, MISI, Bupati Tapin Bapak **Drs. H. M. Arifin Arpan, MM** dan Wakil Bupati Tapin Bapak H. Syafrudin Noor, SE, S.Sos adalah:

"BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS"

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pedagangan Kabupaten Tapin dengan tetap mengacu kepada Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tapin Priode 2018 – 2023, yang merupakan salah satu dokumen perencanaan dalam membuat program kegiatan bidang Perdagangan untuk lima tahun ke depan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Tapin, yang menjadi tolak ukur dan sekaligus mengarahkan semua komponen masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Tapin dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin ini adalah dokumen perencanaan Dinas Perdagangan untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, Dinas Perdagangan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Dinas Perdagangan ini adalah:

- 1. Menjadi Acuan Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin
- 2. Dasar Penilaian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin
- 3. Menjadi Acuan Penyusunan LKIP Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin

Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, Komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Tapin khususnya di Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin.

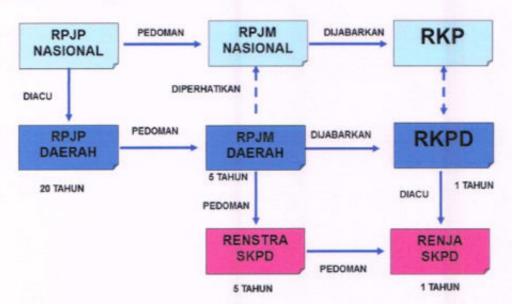
Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Bupati Tapin sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Bupati sebagai Kepala Daerah terpilih.

Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen renstra ini perlu didukung dengan Strategis umum, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut.

Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis, yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mengacu pada RPJMD serta indikator sebagaimana disebutkan diatas. Arah kebijakan penyelenggaraan daerah dituangkan dalam RPJMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam lima tahunan. Selanjutnya, Renstra dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama DPRD setiap tahun.

Dalam penyusunan dokumen Renstra SKPD dilakukan hingga saat menjabarkannya ke dalam Renja, KUA dan PPAS dan RAPBD. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang akan diselenggarakan dalam setiap tahun anggaran harus sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang termasuk di dalam Renstra lima tahunan.

Gambar Hubungan Dokumen Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.



Dokumen Renstra juga dipakai untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara Strategis dan berkelanjutan. Rencana Strategis SKPD dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program Strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4598); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

- 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten TAPIN Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten TAPIN Tahun 2005-2025;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin tanggal 3 Oktober 2016;
- 17. Peraturan Bupati Tapin No. 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tanggal 02 Desember 2016;
- 18. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pegarus-utamaan Gender;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender.
- 21. Peraturan daerah Kabupaten Tapin no 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018 - 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis Dinas Pedagangan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan landasan bagi seluruh komponen yang ada di instansi Dinas Pedagangan sebagai aparatur pemerintah Kabupaten Tapin dalam menyusun kegiatan yang bersifat Strategis dan

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah dalam jangka lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.3.2. Tujuan

- Menetapkan Visi dan Misi sebagai bentuk keinginan yang ingin dicapai secara bersama dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023
- Terwujudnya keselarasan dalam antara RPJMD Kabupaten Tapin 2018-20123 dengan Renstra 2018-2023
- Menjadikan pedoman dalam penyusunan Renja tahunan agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.
- Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Adapun Keuntungan Rencana Strategis sebagaimana dikemukakan Gordan, 1993 halaman 3-6 dikemukakan sebagai berikut :

- a. Antisipasi terhadap masa depan, terutama terhadap peluang dan permasalahan Strategis. Bila jauh hari, kemungkinan permasalahan tersebut dapat diminimalkan dan dampaknya dapat dikendalikan. Bila peluang tidak diantisifasi, maka kita akan kehilangan kesempatan dan mungkin problema muncul karenanya.
- b. Evaluasi Diri, dengan perencanaan Strategis kita semua dapat bekerja bersama untuk mengevaluasi diri, terutama tentang kekuatan dan kelemahan diri akan membuat kita miliki. Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan diri akan membuat kita lebih realistis dalam merencanakan masa depan kita.
- c. Perumusan tujuan bersama melalui consensus, Dengan tipe perencanaan Strategis yang menggaris bawahi pembangunan consensus antar Stakeholders, maka dapat dirumuskan kearah mana kita akan menuju dan dengan cara apa yang terbaik untuk sampai ketujuan tersebut. Dalam pembangunan consensus ini tentunya ada negosiasi "member dan menerima".
- d. Alokasi sumber daya, Perencanaan Strategis mengalokasikan sumber daya dengan menetapkan prioritas dalam perumusan Strategis, yaitu sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.
- e. Pemantapan tolak banding (branchmarks), yang berupa rumusan tujuan dan sasaran. Hasil implementasi atau tindakan dibandingkan dengan tolok banding keberhasilan. Dengan menilai kinerja akan dapat ditarik "pelajaran" dari pengalaman dan masukan balik diperlukan untuk meningkatkan kualitas rencana Strategis dalam hal proses maupun produknya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I.PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan
- 3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra
- 3.4.Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi Dinas Perdagangan
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin secara konsekuensi membawa perubahan terhadap perangkat daerah dan struktur organisasi teknis kelembagaan yang ada di Kabupaten Tapin.

Pemisahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tapin Menjadi Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian serta penggabungan Dinas Perdagangan dengan Dinas Pengelolaan Pasar dipertegas kembali dalam Peraturan Daerah Kabuoaten Tapin No. 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tanggal 03 Oktober 2016.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin.

2.1.1. Tugas Pokok

Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

2.1.2. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan dan penyelenggaran kebijakan teknis bidang perdagangan;
- pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
- e. pengelolaan kesekretariatan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Pelengkapan

2.2.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka yang terdiri dari satuan-satuan organisasi yang merupakan tata kerja kelompok orang secara teratur berkesinambungan dan bersifat formal dan adanya menunjukkan hubungan fungsi, wewenang serta tanggung jawab baik sebagai pemimpin maupun sebagai bawahan dalam melaksanakan tugasnya untuk tujuan organisasi yaitu terdiri dari :

- Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- c. Bidang Perizinan Dan Pengembangan Perdagangan
 - Seksi Pembinaan dan Pelaku Usaha Pedagang
 - Seksi Pengembangan Perdagangan
 - Seksi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- d. Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan
 - Seksi Kemetrologian
 - Seksi Pengawasan Perdagangan
- e. Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Seksi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi
 - Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting
- f. UPT Pasar Rantau
- g. UPT Pasar Binuang

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Tugas Pokok dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Perdaganganan Terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 pada Lampiran2.

2.2.2. Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai di Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin sebanyak 28 orang dapat dirinci menurut Kepangkatan dan Pendidikan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Jumlah
1	Golongan IV	3 Orang
2	Golongan III	15 Orang
3	Golongan II	9 Orang
4	Golongan I	0 Orang
	Jumlah	27 Orang

b. Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Starata 2 (S.2)	1 Orang
2	Starata 1 (S.1)	14 Orang
3	Diploma III (DIII)	2 Orang
4	Diploma II (DII)	1 Orang
5	SLTA	8 Orang
6	SLTP	0 Orang
7	SD	1 Orang
	Jumlah	27 Orang

Daftar Kepegawaian Selengkapnya dapat dilihat pada Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perdagangan pada Lampiran 3.

2.2.3. Perlengkapan

Daftar Perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Kab. Tapin dapat dilihat pada Lampiran 4 :

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan

Kinerja pelayanan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin adalah sesuai dengan Indikator kinerja Utama yang merupakan serangkaian instruksi tertulis yang yang dibakukan mengenai berbagi proses penyelenggaraan pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa harus dilakukan. Untuk menyikapi hal ini maka terdapat 2 (dua) pelayanan yang ada pada Dinas Perdagangan, yaitu:

- Pelayanan Internal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat (bersifat administratif) kepada seluruh unit-unit atau pegawai yang berada dalam lingkungan internal organisasi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2. Pelayanan Eksternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan bersama instansi terkait, YLKI dan pedagang kecil serta pengusaha kecil, berupa pembinaan kepada IKM, pelayanan Kemetrologian, pengawasan predaran barang dan jasa serta penyediaan sarana perdangangan seperti pembangunan dan rehabilitasi pasar tradisional dan pengelolaan pasar daerah. Pelayanan Sektor perdagangan dan pengelolaan pasar sangat berperan penting dan Strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin.

Upaya yang dilakukan adalah dengan penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas serta pengembangan usaha perdagangan yang aman dalam rangka meningkatkan kontribusi rata-rata pendapatan masyarakat (PDRB) dari sektor perdagangan di kabupaten Tapin.

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ATAS DASAR HARGA
BERLAKU DARI SEKTOR PERDAGANGAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2013-2017

		(Daram out		,		
NO	Sektor Perdagangan	2013	2014	2015	2016	2017
	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	371.175	405.400	437.361	475.774	506.660

Untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat, maka ditetapkanlah Peraturan daerah Kabupaten Tapin Nomor 48 Tahun 2017 tentang "Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah Kabupaten Tapin", termasuk didalamnya antara lain:

- 1. Unit Pelaksana Teknis Pasar Rantau
- 2. Unit Pelaksana Teknis Pasar Binuang

Kedudukan Unit Pelaksana Teknis menurut Peraturan tersebut adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas/Lembaga Teknis Daerah.

Adapun Tugas Kepala dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pasar adalah sebagai berikut:

- Unit Pengelola Pasar adalah UPT di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin.
- Unit Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di lingkungan pasar yang meliputi penataan, penertiban, penarikan dan pemeliharaan.
- 3. Susunan Organisasi Unit Pengelolaan Pasar yang terdiri dari :
 - a. Kepala, dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional baik di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin maupun pada Unit Pelaksana Teknis Pasar, sampai saat ini belum dibentuk.

Berdasarkan Peraturan tersebut, berarti kewenangan Dinas dan UPT Pasar sudah jelas, bahwa pelayanan yang sifatnya prinsifil ditangani dinas, misalnya: pembangunan toko, pemindahan pedagang, balik nama, perpanjangan sewa menyewa toko dan lainlain, tapi yang memutuskannya tetap pejabat lebih diatas dalam hal ini Bupati Tapin. Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Pasar tugasnya operasional, pelayanan langsung kepada masyarakat dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, namun tetap berkonsultasi dengan bidang-bidang yang ada pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin serta tetap berkoordinasi dengan instansi terkait yang berkepentingan juga dengan pengelolaan pasar.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat dilihat gambaran pelayanan SKPD Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin sebagai berikut :

- Pelayanan Penagihan Retribusi Pasar
 - a. Pemungutan Retribusi Pasar Harian, Waktu pemungutan dibagi dalam dua kegiatan, pertama pagi hari pukul 05.00 Wita s/d pukul 07.30 Wita dengan petugas berjumlah dua orang. Dan yang kedua siang hari pukul 08.00 Wita s/d pukul 12.00 Wita jumlah petugas juga dua orang. Idealnya petugas pemungut minimal jumlahnya empat orang, dilihat dari waktu dan luasnya lokasi pasar, ke depan akan diusahakan jumlah pemungut retribusi empat orang (khusus pasar Rantau). Sedangkan pasar-pasar lainnya dengan jumlah petugas pemungut dua orang sudah mencukupi persyaratan pelayanan minimal.
 - b. Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan dilaksanakan setiap hari kerja Senin s/d Kamis pukul 09.00 Wita s/d Pukul 12.00 Wita, dan tempat loket Penerimaan Lantai I Pasar Raya Rantau, dengan petugas penerima berjumlah dua orang.

- c. Kalau ada penunggakan sewa toko / retribusi harian toko, akan diberitahukan melalui surat dan belum juga dibayar maka akan dilaksanakan penagihan langsung oleh petugas UPT Pasar yang bersangkutan dengan dibantu petugas dari Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin.
- Pelayanan Pengurusan Perpanjangan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko/Kios/Los/Warung/Petak Milik Pemerintah Kabupaten Tapin.

Setiap tahun pemakai/penyewa diwajibkan memperpanjang surat perjanjian sewa menyewa toko/kios/los/warung/petak milik pemerintah Kabupaten Tapin, yang bersangkutan datang sendiri ke Dinas atau melalui UPT pasar masing-masing, setiap hari kerja Senin s/d Kamis pukul 09.00 Wita s/d pukul 12.00 Wita. Dan hari Jum'at pukul 09.00 Wita s/d pukul 11.00 Wita dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pas photo ukuran 4 x 6 cm 3 lembar.
- b. Tanda lunas pembayaran sewa toko/kios/los/warung/petak dan retribusi hariannya baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.
- c. Surat perjanjian sewa menyewa toko/kios/los/warung/petak tahun sebelumnya.
- d. Photo copy KTP 2 lembar.
- e. Materai Rp. 6.000,00 1 lembar.
- f. Membayar retribusi sampah satu tahun 12.000,00 dan tunggakannya.
- g. Map folio 2 lembar

(Pemberitahuan Perpanjangan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Toko/Kios/ Los/Warung/Petak Milik Pemerintah Kabupaten Tapin, melalui Surat Edaran Kepala Dinas yang disampaikan kepada pemakai/penyewa dan ditempel di papan-papapan pengumuman).

 Pemindahan Hak Sewa Toko/Kios/Los/Warung/Petak Milik Pemerintah Kabupaten Tapin.

Prosedurnya pemakai/penyewa dan yang akan menggantikan bersama-sama datang menghadap Kepala Dinas (Bidang Pemungutan, Pendataan dan Pelaporan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin) setiap hari kerja dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Membayar retribusi pemindahan hak per meter persegi dan retribusi mendapatkan ijin per meter persegi.
- b. Memenuhi syarat-syarat seperti tertera pada poin 2.

Jikalau ada kebijakan pemerintah membangun atau memindah suatu pasar, maka itu ditangani oleh tim yang terdiri dari Wakil Bupati, Unsur Muspida, Instansi terkait, Kelurahan/Desa, Organisasi Pedagang, Perwakilan Pedagang dan Tokoh-tokoh Masyarakat.

Berikut ini adalah Tabel Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindagkop & UKM serta Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindagkop &

UKM Kabupaten Tapin kemudian setelah adanya perubahan nomenklatur SKPD sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin tanggal 3 Oktober 2016 dan Peraturan Bupati Tapin No. 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tanggal 02 Desember 2016. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tapin terbagi namanya menjadi Dinas Perindustrian Kab. Tapin serta Dinas Perdagangan Kab. Tapin dan bergabung dengan Dinas Perdagangan Kab. Tapin maka Indikator Kinerja Dinas Perdangan berubah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan

2.4.1. Tantangan

- Perdagangan dunia yang mengarah pada liberalisasi perdagangan mengakibatkan persaingan semakin tajam
- Sistem distribusi barang kebutuhan pokok yang belum optimal sehingga terdapatnya disparitas harga antar wilayah kabupaten/kota yang cukup tajam, fluktuasi harga di tingkat konsumen dalam kondisi tertentu seperti pada saat hari besar keagamaan, naiknya harga kebutuhan pokok akan berdampak pada inflasi daerah.
- Banyaknya barang beredar yang perlu diawasi, konsumen yang harus dilindungi, dan semakin beragamnnya produk yang ditawarkan dengan kualitas yang baik dari luar negeri kepada konsumen, sehingga tugas pengawasan barang beredar semakin kompleks.
- Makin banyaknya pusat perbelanjaan modern yang bersaing dengan pasar tradisional.
- 5. Kurangnya kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi.
- 6. Maraknya pemasaran online.

2.4.2. Peluang

- 1. Potensi sumber daya alam yang masih cukup besar
- Terbukanya pasar luar negeri merupakan peluang untuk memasarkan komoditi ekspor Kalimantan Selatan yang didukung oleh SDA yang ada.
- Kecenderungan meningkatnya investasi dan meningkatnya SDM melalui pelatihan dan kelembagaan mendorong tumbuhnya industry yang kompetitif dan bersaing.
- Adanya kebijakan dari pemerintah untuk perbaikkan fasilitas sarana dan prasarana pasar daerah.
- Mayoritas pelaku usaha perdagangan sudah mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan usahanya.
- Meningkatnya pemahaman masyarakat akan hak mereka selaku konsumen dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pedagangan

Strategis mencapai tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah tindakan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategis dijabarkan kedalam kebijakan dan program, selanjutnya program akan dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan yang disajikan didalam Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan Tahunan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Tapin meliputi berbagai macam permasalahan antara lain adalah :

- Masih lemahnya SDM Aparatur dalam memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
- Masih kurangnya operator komputer terampil di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin serta kurangnya pegawai pada Dinas Perdagangan Kab. Tapin untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing bidang.
- Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di lingkungan pasar untuk mentaati peraturan dan ketertiban dipasar.
- 4. Belum sepenuhnya kegiatan pada Dinas Perdagangan bisa dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengenai pembagian urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yaitu pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan. Dimana pada Dinas Perdagangan belum mempunyai sarana dan prasarana serta tenaga untuk pelaksanaan tera ulang tersebut.

Semua permasalahan yang diatas tersebut merupakan masalah pokok yang harus menjadi perhatian kita semua. Untuk merencanakan program/kegiatan atau Rancangan Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun kedepan agar semua permasalahan tersebut diatasi semaksimal mungkin.

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam menelaah dari Visi dan Misi Dinas Perdagangan dengan Visi, Misi dan program Bapak Bupati dan Wakil Bupati Tapin priode 2018 – 2023 dapat dijelaskan ;

Visi Bupati dan Wakil Bupati Tapin "BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS"

Untuk melaksanakan visi tersebut maka di jabarkan dalam 5 misi sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.
- Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
- Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).

Dalam mencapai Sasaran RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023 memerlukan tujuan yang bersifat rasional dan obyektif. Adapun sasaran dan tujuan Renstra Dinas Perdagangan 2018-2023 untuk mendukung Visi dan Misi Bupati terpilih terutama dibidang ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat yaitu pada misi kedua yang dijabarkan pada Telaahan mengenai Misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Tapin sebanyak 1 (satu) point di hubungan dengan Misi Dinas Perdagangan dapat dijelaskan seperti berikut ini ;

Misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Tapin ke2 (dua) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa, setelah melalui penelaahan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Tapin maka dapat Dinas Perdagangan untuk penyusunan renstra 2018-2023 seperti yang telah disebutkan diatas.

3.3. Telaahan Renstra K / L dan Renstra Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menetapkan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan sektor perdagangan antara lain, yaitu perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi kemakmuran rakyat yang berkeadilan.

Arah kebijakan pembangunan Perdagangan Nasional ke depan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2015-2019. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun langkah-langkah Strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi 8 (delapan) pokok pikiran, yaitu:

- Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama;
- Memperluas pangsa pasar ekspor di pasar prospektif dan hubungan perdagangan internasional;
- Meningkatkan diversifikasi produk ekspor;
- Mengamankan pasar domestik untuk meningkatkan daya saing produk nasional;
- Meningkatkan aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- 6. Meningkatkan perlindungan konsumen;
- Meningkatkan efisiensi sistem distribusi dan logistik; dan
- Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha perdagangan.

Berdasarkan kedelapan pokok pikiran diatas, langkah-langkah Strategis yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan selama periode 2015-2019 terkait dengan dukungan terhadap perdagangan luar negeri adalah sebagai berikut:

- Pengamanan pangsa ekspor di pasar utama dilakukan melalui beberpa langkah Strategis, yaitu:
 - Pengamanan kebijakan nasional di fora internasional, pengamanan dan optimalisasi akses pasar ekspor, peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dan penurunan hambatan perdagangan.
 - Pengoptimalan instrumen perdagangan internasional, trade remedy, untuk melindungi pasar dalam negeri dan mengamankan akses pasar luar negeri.
 - c. Peningkatan koordinasi dengan berbagai stakeholder di dalam negeri dalam menghadapi tantangan global dan menyuarakan kepentingan nasional di berbagai fora internasional.

- Perluasan pangsa pasar ekspor di pasar prospektif dan hubungan perdagangan internasional dilakukan melalui beberapa langkah Strategis, yaitu:
 - Diplomasi perdagangan berdasarkan region (region based).
 - b. Pelaksanaan diversifikasi pasar prospektif yang telah dan akan dilakukan melalui program misi dagang ke negara-negara Afrika Selatan, Amerika Latin, Eropa Timur, Asia Selatan dan Timur Tengah, termasuk melakukan penguatan cita Indonesia melalui Promosi dan "Nation Branding".
 - Pemanfaatan peran Perwakilan Perdagangan diluar negeri dalam meningkatkan akses pasar produk Indonesia.
 - Dukungan terhadap implementasi hasil perundingan, sosialisasi dan persiapan ASEAN Econoic Community (AEC).
 - e. Kerjasama ekonomi internasional untuk membantu peningkatan akses pasar bagi produk bernilai tambah.
 - f. Diplomasi perdagangan untuk membuka akses pasar dan mengurangi hambatan di negara tujuan ekspor serta mengamankan pasar dalam negeri.
- Peningkatan diversifikasi produk ekspor dilakukan melalui beberapa langkah Strategis, yaitu:
 - a. Pelaksanaan diversifikasi produk yang telah dan akan dilakukan melalui program misi dagang ke negara-negara Afrika Selatan, Amerika Latin, Eropa Timur, Asia Selatan dan Timur Tengah, termasuk melakukan penguatan citra Indonesia melalui Promosi dan "Nation Branding".
 - Peningkatan pengarus utamaan di bidang perdagangan jasa dan peningkatan rasio ekspor jasa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
 - Pembangunan bidang jasa sebagai pendorong ekspor non migas serta peningkatan efisiensi ekonomi dan produktivitas.
 - Mendukung program hilirisasi dalam rangka peningkatan daya saing produk dan dukungan terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Sementara itu, langkah-langkah Strategis yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan selama periode 2015-2019 terkait dengan dukungan terhadap perdagangan dalam negeri adalah sebagai berikut:

- Pengamanan Pasasr Domestik Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Nasional dilakukan melalui langkah Strategis, yaitu:
 - Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri.
 - b. Peningkatan sarana pembentukan harga yang transparan.
- Peningkatan Kontribusi Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM) dilakukan melalui langkah Strategis peningkatan peran UKM.
- Peningkatan Perlindungan Konsumen dilakukan melalui beberapa langkah Strategis sebagai berikut, yaitu:
 - a. Efektivitas Pengawasan Barang / Jasa dan Tertib Ukur.
 - b. Pengembangan standarisasi, mutu produk dan regulasi pro konsumen.
 - Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Konsumen.
- Peningkatan Efisiensi Sistem dan Distribusi Logistik dilakukan melalui beberapa langkah Strategis sebagai berikut, yaitu:
 - a. Pengoptimalan mekanisme dan manfaat pelaksanaan Pasar Lelang, Sistem Resi Gudang (SRG) dan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) untuk pembentukan harga yang transparan dan sarana lindung nilai.
 - b. Integrasi perdagangan antar wilayah.
 - Kebijakan pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui intervensi langsung dan tidak langsung.

Terkait dengan dukungan perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia selama periode 2015-2019 akan melakukan upaya Peningkatan Fasilitasi dan Iklim Usaha Perdagangan melalui beberapa langkah Strategis sebagai berikut:

- Peningkatan pelayanan perizinan ekspor dan impor melalui penyelesaian waktu perizinan ekspor dan impor sesuai dengan Service Level Agreement (SLA).
- Pengembangan sistem perizinan secara online melalui integrasi Inatrade, Indonesian National Single Window (INSW) dan ASEAN Single Window (ASW).
- Peningkatan fasilitasi pembiayaan ekspor.

- Peningkatan pemanfaatan fasilitasi ekspor oleh pelaku usaha antara lain: penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA) preferensi, dan Self Certification.
- Meningkatkan peran Kementerian Perdagangan dalam mewujudkan penciptaan iklim usaha yang kondusif.
- Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah.
- 7. Peningkatan fasilitasi pembiayaan ekspor.
- Peningkatan kualitas pengelolaan impor barang modal / bahan baku, penolong dan pengelolaan impor produk pangan.
- Peningkatan iklim usaha dan kelembangan Perdagangan Dalam Negeri (PDN).

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara geografis Kabupaten Tapin terletak diantara sebelah utara dengan Kabupaten HSS, sebelah selatan dengan Kabupaten Banjar, sebelah barat dengan Kabupaten Barito Kuala dan sebelah timur dengan Hulu Sungai Selatan, dengan luas 2.174,95 km2, terdiri dari 12 kecamatan, 133 desa, dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 sebanyak 170.465 jiwa dan mempunyai berbagai aneka hasil alam yang termasuk di dalamnya adalah Batubara, sawit,rotan, purun dan eceng gondok yang menjadi bahan mentah untuk pembuatan produk kerajinan khas daerah Kabupaten Tapin.

Potensi Perdagangan di wilayah Kabupaten Tapin ini cukup prospektif untuk ekplorasi batubara dan terdapat Perkebunan Kelapa Sawit tiap wilayah kecamatan sehingga mempengaruhi misi Dinas Perdagangan Meningkatkan perdagangan Barang Dan Jasa yaitu berupa Permasalahan sektor perdagangan berbahan baku hasil-hasil pertambangan di indikasikan dapat merusak lingkungan, begitu juga ekplorasi akibat perluasan perkebunan akan merusak habitat flora dan fauna, gangguan kesehatan masyarakat akibat penurunan kualitas air, sedangkan ruang lingkup pelaksanaan bidang perdagangan di fokuskan pada industri kecil dan menengah baik yang berbasis pertanian maupun non pertanian sehinngga secara optimal dapat memberikan nilai tambah yang tinggi dan mampu bersaing dalam pasar lokal, regional dan global melalui upaya-upaya baik di sektor perdagangan.

Kebijakan umum dalam di bidang ekonomi adalah mempercepat pemulihan dan mengembangkangkan usaha-usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan serta meningkatkan produktifitas seluruh potensi yang dimiliki masyarakat. Kebijakan yang perlu dilakukan adalah memberikan prioritas bagi usaha-usaha yang menyerap banyak tenaga kerja dan menggunakan bahan baku lokal.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, isu Strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain diangkat dari situasi dan kondisi ekonomi saat ini serta kemungkinan kondisi dimasa datang.

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi permasalahan dari berbagai aspek Perdagangan Kabupaten Tapin dapat dirumuskan beberapa kebijakan isu-isu Strategis yang dihadapi. Penentuan isu Strategis menjadi bagian penting bagi penyusunan RENSTRA Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023. Maka dapat diidentifikasi Isu-Isu Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya pengembangan usaha pada sektor Perdagangan;
- Masih beredarnya barang atau produk kadaluarsa yang tidak layak jual di Kabupaten Tapin;
- 3. Kurang dikenalnya produk kerajinan Kabupaten Tapin;
- Pengembangan potensi sumber alam dengan tingkat pengelolaan dan pemanfaatan saat ini perlu ditingkatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai target dan sasaran pembangunan perdagangan di daerah
- Perlu dibangun UPTD Meterologi pengujian alat ukur takar timbang dan penyediaan aparatur penera.
- Peningkatan informasi tentang potensi komoditi yang berpeluang ekspor khususnya kepada dunia usaha dan investor baik dalam dan luar negeri sehingga tertarik untuk pengembangannya di Kabupaten Tapin.
- Perlunya dirancang perda di bidang Perdagangan yang menyangkut perlindungan konsumen dan penerapan SNI wajib uji;
- Mempercepat sasaran pembangunan atau revitalisasi sarana dan pembinaan di bidang perdagangan sehingga dapat mencapai target yang diharapkan;
- Perlunya data dan informasi kepada pelaku usaha tentang wajib daftar perusahaan dan syarat-syaratnya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Berdasarkan visi dan misi SKPD Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin menetapkan tujuan adalah Meningkatnya LPE Sektor Perdagangan.

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran berdasarkan visi dan misi SKPD Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin adalah Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pada berdasarkan nomenklatur SKPD Dinas Perdagangan yang dapat dilihat pada Tabel Tujuan & Sasaran Jangka Menengah SKPD pada Lampiran 5.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra-PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD.

Dalam rangka untuk menata lingkungan pasar ke arah yang lebih baik, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin perlu diadakan Strategis dan kebijakan dapat dilihat pada Tabel Strategis dan kebijakan pada lampiran 6.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Kabupaten Tapin 2018-2023 serta mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapin priode 2018 – 2023, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah (Renstra-PD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran.

Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk lebih jelas mengenai rincian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perdagangan dapat dilihat pada tabel Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Lampiran 7.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023.

Dengan demikian, indikator kinerja Dinas Perdagangan dengan target sampai dengan Tahun 2023 disajikan Pada tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah Lampiran 8.

BAB VIII PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin 2018-2023, maka Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin mempunyai acuan arah pembangunan dalam menyikapi perkembangan dan dinamika yang terus berubah dengan cepat.

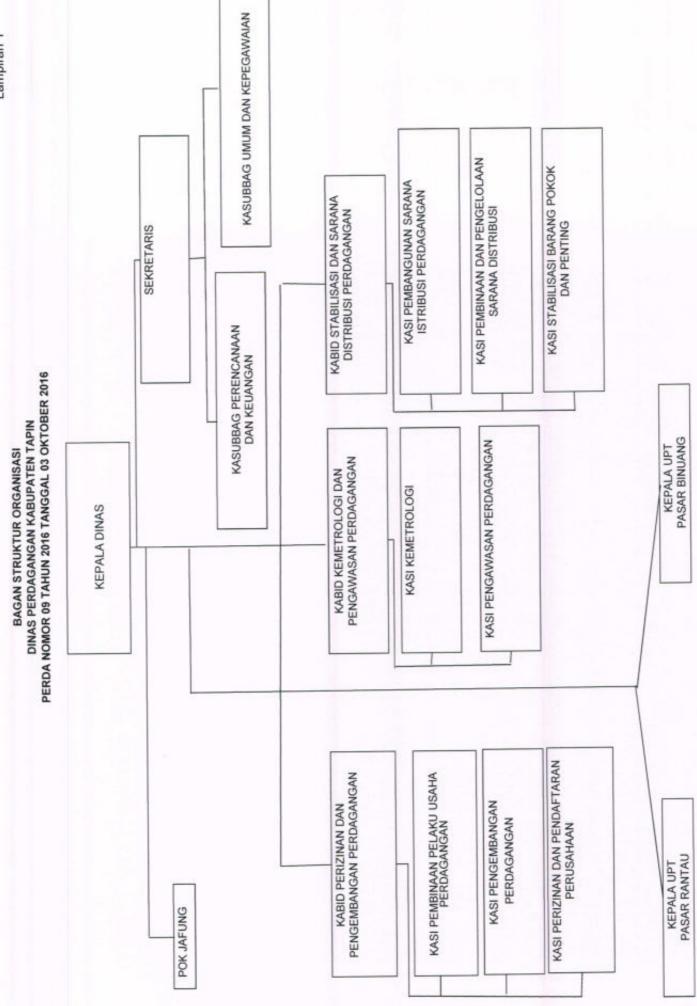
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan ini merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja Dinas Perdagangan. Oleh karena itu efisiensi dan efektifitas implementasi Renstra sangat memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, stakeholders dan dukungan seluruh komponen organisasi.

Tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin akan mudah dicapai dengan dukungan penuh dan upaya maksimal dari seluruh aparatur Dinas Perdagangan dengan memperhatikan faktor-faktor :

- Kepedulian yang tinggi dari semua jajaran aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dapat memberikan konstribusi terhadap keberhasilan organisasi secara menyeluruh.
- Peka terhadap perubahan dan perkembangan global yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi
- Tim-tim kerja yang ada dilingkungan Dinas Perdagangan diharapkan dapat memadukan segala keahlian dan kelebihan personal yang dimiliki secara bersamasama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan dapat memecahkan masalah lintas fungsional di dalam organisasi

BUPATI TAPIN.

M. ARIFIN ARPAN





BUPATI TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN.

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, perlu
mengatur Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
 Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
 Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
 Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
 tentang Pembinaan dan Pengawasan
 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 6041);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK,
FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS ORGANISASI DINAS
PERDAGANGAN KABUPATEN TAPIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Tapin.
- Dinas adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin.
- Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin.
- Bidang adalah Bidang-Bidang di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin.
- Subbagian adalah Sub-Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin.
- Seksi adalah Seksi-Seksi pada Bidang-Bidang di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin.
- 10. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin.
- 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS ORGANISASI

Bagian Kesatu

Dinas Perdagangan

- (1) Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan;
 - b. pelaksanaan dan penyelenggaran kebijakan teknis bidang perdagangan;
 - pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT;
 - e. pengelolaan kesekretariatan; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang perizinan dan pengembangan perdagangan, kemetrologian dan pengawasan perdagangan, stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan;
 - b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perizinan dan pengembangan perdagangan;
 - c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang kemetrologian dan pengawasan perdagangan;

- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan perizinan;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perizinan dan pengembangan perdagangan, kemetrologian dan pengawasan perdagangan, stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan;
- g. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
- h. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.
- (4) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan;
 - c. Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan;
 - d. Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 3

(1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.

pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan g. penyusunan program, pembinaan koordinasi, qsu pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan penyusunan program, pembinaan koordinasi, dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga; e. penyusunan program, koordinasi pembinaan qsn pengendalian pengelolaan aset Dinas; d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan keuangan; penyusunan anggaran pengendalian dan pengelolaan c. penyusunan program, pembinaan koordinasi, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; b. penyusunan koordinasi, program, pembinaan dan Dinas; pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan program, a. penyusunan koordinasi, pembinaan qsn Sekretariat mempunyai fungsi:

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dinas; a. menyusun program, mengoordinasikan, membina adalah sebagai berikut: (3) Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hubungan masyarakat.

- mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan
- membina
- qsu pengelolaan c. penyusunan program, koordinasi, dan pembinaan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; program, b. menyusun mengoordinasikan, dan
- e. penyusunan program, koordinasi, dan pembinaan pengendalian pengelolaan aset Dinas; d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan keuangan; pengendalian penyusunan anggaran

pengendalian pengelolaan surat-menyurat;

- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
- i. mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur lingkup Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, penatausahaan keuangan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.
- (2) Uraian tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
 Dinas;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas yang terintegrasi;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengesahan dokumen anggaran;
- e. menyiapkan bahan dan mengolah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dalam rangka melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. menyiapkan bahan dan mengolah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
- h. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- i. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindaklanjut hasil pemeriksaan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan semesteran dan tahunan serta mengevaluasi realisasi anggaran untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2 Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan

- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan administrasi kepegawaian;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan suratsurat dan ekspedisi;
- d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan tata naskah dinas, uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
- g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya;
- menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian serta kedudukan hukum pegawai;
- j. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
- k. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi dan koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitasi lainnya;

- m. melaksanakan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai manual administrasi barang;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan serta pengelolaan aset;
- melaksanakan urusan rumah tangga berkenan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
- q. mengumpulkan bahan penyusunan Standar Operasional
 Prosedur Dinas;
- r. memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat fungsional yang ada di lingkup Dinas; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan

- (1) Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaku usaha pedagangan, pengembangan perdagangan, perizinan dan pendaftaran perusahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaku usaha pedagangan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan perdagangan;
 - penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perizinan dan pendaftaran perusahaan;

- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian partisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyelenggaraan kampanye pencintraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan,
 dan pengendalian pelaku usaha yang berorientasi ekspor; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perizinan dan pengembangan perdagangan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pembinaan pelaku usaha pedagangan, pengembangan perdagangan, perizinan dan pendaftaran perusahaan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaku usaha pedagangan;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan perdagangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perizinan dan pendaftaran perusahaan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota;

- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan partisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan kampanye pencintraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
- menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaku usaha yang berorientasi ekspor;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perizinan dan pengembangan perdagangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan;
 - b. Seksi Pengembangan Perdagangan; dan
 - b. Seksi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.

Paragraf 1 Seksi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan

- (1) Seksi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pembinaan pelaku usaha perdagangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan pelaku usaha perdagangan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan pelaku usaha perdagangan;

- mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bidang pembinaan pelaku usaha perdagangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendampingan dalam pengurusan pendaftaran kekayaan intelektual, proses sertifikasi halal, sertifikasi mutu barang atau profesi, dan/atau sertifikasi lainnya;
- e. menyiapkan bahan dan penyediaan ruang pamer produk ekspor secara fisik (non virtual) dan/atau non fisik (virtual);
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan desain produk;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyebarluasan informasi terkait dengan pengembangan ekspor;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha, seperti sosialisasi/seminar/adaptasi produk, lokakarya, temu wicara, pelatihan, program pendampingan, dan/atau kegiatan pengembangan lainnya;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi keikutsertaan pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada pameran dagang di dalam dan di luar negeri;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi keikutsertaan pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada misi dagang;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi kemitraan pelaku usaha;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan penyertaan pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada kegiatan penghargaan nasional;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring bantuan sarana usaha perdagangan;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja bidang pembinaan pelaku usaha perdagangan; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2 Seksi Pengembangan Perdagangan

- (1) Seksi Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan perdagangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan perdagangan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan perdagangan;
 - mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data bidang pengembangan perdagangan;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang internasional, pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
 - e. menyiapkan bahan dan menyediakan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan saat berpartisipasi dalam pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dilakukan pencitraan;
 - menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan promosi lain yang mendukung kampanye pencitraan;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan publikasi melalui

- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi terhadap produk daerah;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan pembahasan dan penentuan produk unggulan dan potensial;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan layanan informasi mengenai produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pengembangan perdagangan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

- (1) Seksi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perizinan dan pendaftaran perusahaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perizinan dan pendaftaran perusahaan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perizinan dan pendaftaran perusahaan;
 - mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data bidang perizinan dan pendaftaran perusahaan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah, termasuk peraturan zonasi;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman penerbitan Rekomendasi/Izin Usaha Pengelolaan Pasar

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerbitan Rekomendasi/Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman penerbitan tanda daftar gudang;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk:
 - 1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri;
 dan
 - 3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman penerbitan Surat Rekomendasi/Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan Pembentukan Tim Terpadu dalam rangka pengendalian, pengawasan dan peredaran minuman beralkohol;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembuatan berita acara pemeriksaan lapangan bagi distributor minuman beralkohol;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dan perizinan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembentukan Tim Pemeriksa dan Pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Kabupaten/Kota;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat Kabupaten/Kota;

- menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman pemberian rekomendasi penerbitan pedagang kayu antar pulau terdaftar dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja perizinan dan pendaftaran perusahaan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat

Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan

- (1) Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kemetrologian dan pengawasan perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kemetrologian;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengawasan perdagangan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan ukuran;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan dan Petugas Pengawas

- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan kegiatan di bidang perdagangan dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar dan tempat penyimpanan serta penegakan hukum pelanggaran di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di daerah.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis kemetrologian dan pengawasan perdagangan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kemetrologian;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengawasan perdagangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengawasan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan ukuran;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan dan Petugas Pengawas Tertib Niaga;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengawasan kegiatan di bidang perdagangan dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar dan tempat penyimpanan serta penegakan hukum pelanggaran di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen di daerah; dan
 - melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

- (4) Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan terdiri atas:
 - a. Seksi Kemetrologian; dan
 - b. Seksi Pengawasan Perdagangan.

Paragraf 1 Seksi Kemetrologian

- Seksi Kemetrologian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi kemetrologian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kemetrologian;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kemetrologian;
 - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kemetrologian;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan kemetrologian;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemetaan jumlah potensi alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengelolaan cap tanda tera;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan dan pengelolaan standar kerja dan peralatan kemetrologian;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelaporan kegiatan pelayanan tera/tera ulang ke Pemerintah Pusat;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan rekrutmen Penyidik
 Pegawai Negeri Sipil Perdagangan dan Petugas Pengawas
 Tertib Niaga;
 - menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan dan Petugas Pengawas Tertib Niaga dengan perangkat daerah, instansi

- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kemetrologian;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja kemetrologian; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Paragraf 2 Seksi Pengawasan Perdagangan

- Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengawasan perdagangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengawasan perdagangan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengawasan perdagangan;
 - mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengawasan perdagangan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamatan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan ukuran;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamatan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan ukuran dalam penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelaporan kegiatan pengawasan ke Pemerintah Pusat;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan pengawasan barang

- menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dan penegakan hukum dengan perangkat daerah, instansi pemerintah, dan/atau pihak ketiga terkait;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi, publikasi, dan informasi terkait kegiatan pengawasan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pengawasan perdagangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima

Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan

- (1) Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan sarana distribusi perdagangan, pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi dan stabilisasi barang pokok dan penting.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembangunan sarana distribusi perdagangan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi;
 - penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian stabilitas barang pokok dan penting;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;

- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pemantauan harga, informasi ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah;
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengawasan pupuk dan pestisida di daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi; dan
- h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian dan penyediaan data/informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan).
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pembangunan sarana distribusi perdagangan, pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi dan stabilisasi barang pokok dan penting;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan sarana distribusi perdagangan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan stabilisasi barang pokok dan penting;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di daerah;

- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemantauan harga, informasi ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah;
- menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengawasan pupuk dan pestisida di daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan data/informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan terdiri atas:
 - a. Seksi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi; dan
 - Seksi Stabilitas Barang Pokok dan Penting.

Seksi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan

- (1) Seksi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pembangunan sarana distribusi perdagangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembangunan sarana distribusi perdagangan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembangunan sarana distribusi perdagangan;
 - mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembangunan sarana distribusi perdagangan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi dan usulan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembangunan/ revitalisasi sarana distribusi;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring pembangunan/revitalisasi sarana distribusi;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pembangunan sarana distribusi perdagangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi;
 - menyiapkan bahan dan menyusun pedoman/petunjuk teknis pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi;
 - mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pengelola sarana distribusi perdagangan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kinerja pengelola sarana distribusi perdagangan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring bantuan sarana usaha perdagangan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja bidang pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting

- (1) Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi stabilisasi barang pokok dan penting.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan stabilisasi barang pokok dan penting;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis stabilisasi barang pokok dan penting;
 - mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data stabilisasi barang pokok dan penting;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di daerah;
 - menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Daerah, produsen, distributor, dan pengecer di daerah;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja stabilisasi barang pokok dan penting; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Pasal 17

Ketentuan tentang Pembentukan UPT Dinas beserta tugas pokok, fungsi dan uraian tugas diatur kemudian dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat pada Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

Pasal 21

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Dinas dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pelaksana Harian (Plh); dan
- b. dalam hal Kepala Dinas dan Sekretaris berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) berdasarkan senioritas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 16), dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2009 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau pada tanggal 17 Oktober 2017 BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 17 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2017 NOMOR 27



BUPATI TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah pada Peraturan Bupati Tapin nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, maka indikator kinerja utama perangkat daerah perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan indikator kinerja utama perangkat daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
- 15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapin sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Tapin.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Tapin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 5 (lima) tahun.
- 7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 8. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tapin untuk periode 1 (satu) tahunan.
- 9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- 10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
- 11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
- 12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Renstra Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023.
- (2) sasaran dan indikator kinerja utama perangkat daerah pada Peraturan Bupati Tapin nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini .

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

> Ditetapkan di Rantau pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI TAPIN

H. M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARI DAERAH KABUPATEN TAPIN,

H. MASYRANIA NSYAH, SP, M.MA, MP

CATATAN 10 Pemelharaan Rutin/Berkala Gedung Penyedaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Komunikasi, sumbendaya air dan euangan enyedaan Alat Tufis Kantor Penyediaan Barang cetakan dan enyedisan makanan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Ponyediaan Jasa Kebersihan Kantor neliharaan Butin J Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Dinas / Operasional Penyediaan Jasa eamanan Kantor Barrik Penyediaan Jasa Administrasi Berkala Peralatan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Pemyediaan Jasa angunan Kantor entaris Kantor PAGU dan minuman neebneggnan -wednan-Capin Expo hengadaan. SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019 KEGIATAN URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN PROGRAM DINAS PERDAGANGAN KEGIVLVN KODEFIKASI PROGRAM SKPD 10 BIDANG NVSONO Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor enyediaan Barang emediaan Jasa eamanan Kantor Vertrinan Kendaraar Sinas / Operasional emeliharaan Rutin Berkala Peralatan istrik/Penerangan Pemeliharaan dan gunan Kantor ventaris Kantor Penyedaan Alat empediasn lass Penyedian Jasa Pemelharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Penyediaan makanan dan PAGU dministrasi eedgeaugaau Sapat - rapat etakan dan numbasi, ulis Kantor Tapin Expo uedueno sultasi DOKUMEN YANG MASIH BERLAKU (RPJMD DAN RENSTRA) Penyediaan Barang cetakan dan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Pengadaan Perlengkapan dan Penalatan Gedang Kantor enyedisan Jasa Administrasi (Dilsi dari Renstra) Jistrik/Penerangan Bangunan Pemeliharaan Rutin / Berkala Venyediaan Jasa Komunikasi. myediaan Alat Tulis Kantor lapat - rapat Koordinasi dan Penyedaan Jasa Kebersihan enyediaan Jasa Keamanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Penyediaan makanan dan alatan Inventaris Kantor nberdaya air dan listrik Gedung Kantor enggandaan fapin Expo onsultasi neguen numan antoc Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Program Pelayanan Administrasi rogram Pelayanan Administrasi Vogram Pelayanan Administrasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi (Ditsi dari RPJMD) Program Pelayanan Admi Prasarana Aparatur Perkantoran Perkantoran Perkantoran Gnitoran Perkantoran Perkantoran Perkantoran Perkantoran Perkantoran 1 5 1 3 1 7 * KEGIATAN 91 2 3 2 2 3 6 1 2 4 1 2 3 KODEFIKASI PROGRAM -3 6 1 3 6 1 = 3 6 1 3 6 1 3 6 1 3 6 1 ÷ SKPD 3 6 1 3 6

,					hegistan	06 July		kegiatan			begistan		kegiatan		kegistan	
CATATAN		9			11.600.000 1 kegistan jadi 2 sub kegistan	8.000.000 Tidak ada di Permendagri 90		7.540.000 1 kegistan jadi 2 sub kegistan			1.000.000 2 kegiatan jadi 1 sub kegiatan		500.000 2 kegistan jadi 1 sub kegistan		80.000.000 1 kegistan jadi 2 sub-kegistan	
PAGU		Rehabilitasi sedang/berat godung	Renton Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realeasi Kinerja SKPD	Penyusunan Pelaporan Keuangan	11.600.000	8.000.000	13.780.000	7.540.000	23.700.000	15,100,000	1.000.000		200.000	50.000.000	80.000.000	
SUBKEGIATAN	4	71			Pengendalan Ketersadiaan Barang Kebutuhan Pekek dan Barang Penting di Tagkat Agen dan Pasar Rakyat			Pengendalian Ketensediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Setu) Kalbupaten/Kosta	Pengawasan/Penyaluhan Metrologi Legal	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Nasional	
KEGIATAN	0	0			Menjamin Ketersedban Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Ponting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			Merjamin Ketersediaan Barang Kebutuban Polok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendakan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokot, dan Barang, Penting Di Tingkat, Pasar Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tora, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal Benga Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pelakuanan Metrologi Logal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawaian	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Penyebinggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggolan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah	Kabupaten/Kota
PROGRAM	7				PROGRAM STABILISMS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKDK DAN BARANG PENTING	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERUNDUNGAN KONSUMEN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PROGRAM PENINGRATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGEN	PRICGRAM PENGEMBANGAN EKSPIDR	
					201			201 03	2.02 03	2,01 02	2.01 01	2.02 01	2.01 01	2,01 01	201 02	
KODEFIKASI	10				20			8	8	90	8	8	90	60	8	
9	1							10	2	10	10	10	10	10	to	
					30			3 30	E .	e S	3 30	3 30	9 8	R R	3 30	
PAGU	4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan lihitsar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Pelaporan Keuangan	11.600.000	8.000.000	13.780.000	7,540,000	23.700.000	15.100.000	1,000,000		200,000	20 000 000	80,000,000	
(Disi dari Renstra)	4	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPO	Penyatunan Pelaporan Kesangan	Pengawasan Barang Baradar, Barang dan Jasa, Barang Dalam Koadaan Terbungkus	Penyuluhan Perlindungan Konsumen	Pengawasan dan Penertiban Reklame	Pengawasan Pemantauan Monitoring dan Informasi Hanga Sembako	Operasi Pasar	Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Pengadaan peralatan standar kemetrologi	pembuatan perda jasa retribusi kemetrologi	Pembangunan Gedung Metnologi	Semarak hari jadi Kabupaten Tapin	Partisipasi Pameran Luar Kabupaten Tapin	
(Ditsi dari RPJMD)	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capalan Kinerja dan Keuangan	Program Perfindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Pendagangan	Program Perfindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Program Promosi dan Informasi Daerah	Program Promost dan Informasi Daerah	
3		un.		2	**	~	m	4	5	9	7		D)	2	-	ſ
KODEFIKASI	-	1 2	e .	_	#	44	4	4	1 4	4	1 4		4	in .	in.	F
0		10	· u		w	10	9	9	9	9	9		et o	9	#	+
		m	m	m	m	m	m	m	m	m	m		m	-	m	H

CATATAN	44	10	1.137.180.000 3 Kegistan jadi 1 sub kegistan											Tidak ada di Permendagri 90		
PAGU		33.500,000	1.137.180.000 31	253.640,000	450,800,000	48.250.000	25.000,000	3.800.000	40.000.000	1.000.000	1,000.000	200.000	000'005	29.400.000 Tid	8,000,000	35.000,000
SUB KEGIATAN	0	Penyedaan Sarana Distribusi Pendagangan	Fasiltasi Pengeldiaan Sarana Distribusi Pendagangan	Fasiltasi Pengoldian Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Pendagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembraan dan Pengendalan Pengelola Sarana Distribusi Pendagangan	Pemantauan Harga dan Stok Berang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Keta	Pembesan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Pendagangan	Fasiltasi Pengelolaan Sarana Distribusi Pendagangan	Perryedaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyedaan Sarana Distribusi Pendagangan	Penyedisan Sarana Distribusi Pendagangan		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Espor Unggulan Kabupaten/Kota	Fasiliasi Pemendhan Kornimen Perolehan Perizinan Pasar Bakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swaliwan melajal Sistem Pelikyanan Perizinan Bensaha Perekaganai Secara Entronik
KEGIATAN	ox	Pembangunan dan Pengelotaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembanguhan dan Pengelotaan Sarana Distribusi Pendagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengeloluan Sarana Distribusi Pendagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Pendagangan	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Pengendalan Harga, dan Stok Berang Kebunthan Pokoki, dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengeloban Sarana Distribusi Pendagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dogang Bagi Produk Espor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Lish Pregelotaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Ion Usaha Toko Swalayan
PROGRAM	7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SABANA DISTRIBUSI PENDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGAMGAN		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
KODEFIKASI	in.	01 03 2,01 01	01 03 2.01 02	01 03 2.02 02	01 03 2.02 02	01 03 2,01 01	01 03 2.02 01	01 04 2.02 01	01 03 2.02 01	01 03 2:01 02	01 03 2,01 01	01 03 2,01 01	01 03 2,01 01		01 05 2.01 01	01 02 2.01 01
-		3 30	3 30	38	3 30	3 30	3 30	8	9.	3 30	3 30	38	8		3 30	GE 30
PAGU	4	33.500.000	1.137.180.000	253.640.000	450.800.000	48.250.000	25.000.000	3.800.000	40,000,000	1,000,000	1.000.000	300,000	200,000	29,400,000	8.000.000	35.000.000
(Dilsi dari Renstra)	4	Pemelharaan sarana/prasarana pasar	Pembersitan Lingkungan pasar	Pembershan Drainase Pasar	Pengamanan dan peneriban pasar	Peresonian Pasar Kuliner Ramadhan	Pombuatan Surat Perjanjan Sevas Menyewa Toko/Kico/Wanang	Pendataan Harga Barang Pokok. dan Barang Penting	Pemutakhiran Data Penyewa Tokoyktos/Marung	Pembustan raperda retribusi pasar	Pengembangan dan peningkatan pasar	pemhangunan pasar	revitalisasi pasar tradisional	Sosialisasi SRG	Penyuluhan pedagang kecil Informal	Rekomendasi izin usaha perdagangan
(Dikis dari RPJMD)	3	Program Pengembangan Sarana Distribusi Pendagangan	Program Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Pengembangan Sarana Distribusi Pendagangan	Program Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Pengembangan Sarana Distribusi Pendagangan	Program Pengembangan Sarana Distribusi Pendagangan	Program Pergembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Pengembangan Sarana Distribusi Pendagangan	Program Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Pengembangan Distribusi Perdagangan	Program Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Pengembangan Sarana Distribusi Pendagangan	Program Pengembangan Usaha Pendagangan		Program Pengembangan Usaha Perdagangan
KODEFIKASI	1 5	7	m so	4	in in	9	2	ω	6 12	6 13	6 14	6 15	9 16	7 1	2	m
EFI	-	-	-	-	-	-	1	-	1	9	1 6	1	1 6	1 7	1	+
8	1 1		up.	6	w.	w.	w	40	· o	ω	10		_	_		

CATATAN		2.925.000 Tidak ada di Permendagri 90	2.000.000 Tidak ada di Permendagri 90		223.000.000 Tidak ada di Permendagri 90		
PAGU		2,925,000	2.000.000	10.775.000	223.000.000		
SUB KEGIATAN				Favilitasi Penerbitan Surat Itim Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C.		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Espor Unggulan Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
KEGIATAN	9	0		Perenthitan Surat Izin Usaha Favilitasi Perenthitan Surat Perdagangan Minuman Beralkohol Itin Usaha Perdagangan Golongan 8 dan C. Untak Pengerer dan Minuman Beralkohol Golongan Perijual Langsung Minum Di Tempat 8 dan C.		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Tendasat Pada 1 (Satu) Daerah Kabusoten/Kota	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM	7			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		01 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Penyelenggarana Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggala yang Perdapat Pada 1 (Sata) Daerah Kabusorin-Alkota.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
KODEFIKASI	15			30 01 02 2.05 01		30 01 05 2.01	3 30 01 05 2.01 01
		000	900	000	000	E	es de la companya de
PAGU	4	2.925.000	2.000.000	10.775.000	223.000.000		
KEGIATAN (Dibi dari Renstra)	4	Pengawasan, monitoring dan evaluasi perusahaan	Monitoring dan pengawasan SRG	Pengawasan dan pengendalan minuman beraikohol	Pengelolaan SRG	pendataan produk unggulan daerah	socialisasi STPP bokor
PROGRAM (DHs dari RPIMD)	3	Program Pengembangan Usaha Perdagangan	Program Pengembangan Usaha Perdagangan	Program Pengembangan Usaha Pendagangan	Program Pengembangan Usaha Pendagangan	Program Pengembangan Usaha Pendagangan	Program Pengembangan Usaha Perdagangan
KODEFIKASI	1	6 1 7 5	1 7 7	1 7 4	1 7 11	1 7 16	6 1 7 16
		9	3	m m	3		m

Penanggungjawab Disdag Disdag Disdag Disdag SKPD Disdag Disdag Disdag Disdag Disdag Disdag Disdag Disdag 8% 70% 100% 79,00 1,40% 89% Kondisi 8% 79,00 100% 1,40% 2023 70% 89% ž 78,00 2022 1,50% 100% 9609 85% Target 5 Tahun 2021 76,00 100% 1,50% 805 969 81% 8 100 92,68 76 188 2020 8 100 92,68 75 18 2019 85 100 69,41 90,24 102,08 2018 Kondisi Awal 2017 8 71,06 akurat Persentase Pasar Tradisonal Bidang Metrologi Legal yang Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kenyamanan Pasar Persentase Pasar Tradisonal yang direvitalisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi perlaku terhadap UTTP dan Kenyamanan Pasar Persentase bangunan pasar Hasil Temuan Barang Beredar yang tidak Sesuai Persentase Pelaku Usaha perlengkapannya (UTTP) Persentase Tindak Lanjut perlengkapannya (UTTP) barang kebutuhan pokok Masyarakat (Pedagang) Persentase ketersediaan Pokok dan Penting yang yang memenuhi kriteria yang bertanda tera sah yang bertanda tera sah nformasi harga Barang layak Koefisien variasi harga nemenuhi ketentuan Sektor Perdagangan (Pedagang) terhadap Persentase alat ukur Persentase alat ukur Indikator Survey Kepuasan dimbangan dan imbangan dan ahun berjalan vang dibangun RPJMD (indeks) Konsumen dan Pengamanan Program Pengembangan Program Perlindungan Program Sarana Distribusi Perdagangan erdagangan, Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan Tujuan/Sasaran Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS agrobisnis dan pariwisata yang ekonomi berkualitas berbasis Meningkatkan pertumbuhan Visi & Misi dimulai dari desa. No

Disdag	Disdag	Disdag	Disdag	Disdag	Disdag	Disdag	Disdag	Disdag	Disdag
		12,50%				4	100%	100%	100%
		12,50%				<	100%	100%	100%
		12,00%				<	100%	100%	100%
		11,00%				88	100%	100%	100%
100	100		100	100	100				
100	100		100	100	100				
100	0		100	88,83	100				
100	100		94,08	86,09	100				
Persentase Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan	Persentase Petani yang mendapat Resi Gudang	contribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam condisi baik	ersentase laporan kinerja lan keuangan yang disusun lan dilaporkan tepat waktu	Vilai SAKIP Dinas	Persentase Penyerapan Anggaran	Persentase Aset Yang ercatat	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian ASN
Program Pengembangan Usaha Perdagangan			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Peningkatan Sarana F dan Prasarana Aparatur K	gkatan 1 Sistem alan Kinerja		a 4	4 1	
	Persentase Rekomendasi 100 100 100 100 100 lizin Usaha yang diterbitkan	Persentase Rekomendasi 100 100 100 100 100 100 Izin Usaha yang diterbitkan Persentase Petani yang 100 0 100 100 100 mendapat Resi Gudang	Persentase Rekomendasi 100 100 100 100 Izin Usaha yang diterbitkan 100 0 100 100 Persentase Petani yang 100 0 100 100 Ronrinbus Sektor Ronrinbus Sektor 11,00% 12,50% 12,50%	Persentase Rekomendasi 100 100 100 100 Izin Usaha yang diterbitkan 100 0 100 300 Persentase Petani yang 100 0 100 300 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PORB 12,50% 12,50% 12,50% Persentase unit kerja yang 94,08 100 100 100 mendapatkan pelayanan 3dministrasi perkantoran 3dministrasi perkantoran 3dministrasi perkantoran	Persentase Rekomendasi 100 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100	Persentase Rekomendasi 100	Persentase Rekomendasi 100 100 100 100 100 100 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 10,	Persentase Rekomendasi 100	Persentase Rekonendasi 100

Tujuan & Sasaran Jangka Menengah SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal	Awal 2018	TA TA	RGET KINERJA TU	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	PADA TAHUN K	
	2	3	4	S	9	7	00	6	10	11
≥ 0	Meningkatkan pelayanan sekretariat	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat			75		79	08	150
- 4	2 Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	6,49%		%6	10%	%9	7%	%8

Perdagangan
Dinas
n Kebijakan
dan
Stratergi

_				00	RF	RENCTRA		
- 3		: ISIN	BER	BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	SEJAH	TERA DAN AGAMIS		
		MISI I	Men	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.	erkuali	tas berbasis agrobisnis dan pariv	wisata	yang dimulai dari desa.
		Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
	-	Meningkatkan pelayanan	н	Meningkatnya penyediaan	1	Pemenuhan kebutuhan	н	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana
		sekretariat		administrasi perkantoran, sarana		administrasi, sarana prasarana		dan prasarana perkantoran
				prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen		perkantoran	2	Meningkatkan efesiensi penggunaan Bahan Habis Pakai administrasi perkantoran
				perencanaan perangkat daerah			3	Meningkatkan efektivitas pengelolaan barang
_								milik daerah
_					2	Peningkatan kualitas pelaporan	4	Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan
						kinerja dan keuangan		kinerja dan keuangan
_					е	Peningkatan kualitas dokumen	2	Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan
						perencanaan perangkat daerah		dokumen perencanaan perangkat daerah
	7	Meningkatkan PDRB	2	Meningkatnya PDRB Sektor	4	Peningkatan Kuantitas Pelaku	9	Menyelenggarakan sosialisasi bagi produsen
		Sektor Perdagangan		Perdagangan		Usaha Perdagangan dan		dan konsumen, pengawasan,monitoring,
						Kualitas Produk yang Beredar di		evaluasi terhadap kondisi barang dan jasa serta
_					Т	Pasaran		menjaga stabilitas harga
					2	Peningkatan sarana dan	7	Mengadakan even untuk promosi dan
						prasarana pasar daerah dan		Peningkatan sarana dan prasarana
						pelayanan pasar yang bersih,		perdagangan
						tertib dan aman		
							00	Menjaga Kebersihan, keamanan dan ketertiban
_								lingkungan pasar daerah
_							6	Pengembangan dan pembangunan sarana
_								prasarana pasar

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

		h tokail	,	-																		
	Unit Kerja	Perangkat Daerah Penangkat Daerah	The state of the s	30																		
	Kondhil Kherja pada akhir perlode Rosstra Perangkat	ersh	2	19		969.390.000				16.290.000	35,000,000	16,000,000	16.900.000	41,100,000	64 101 000	0	200,000,000	0	7.108.000.000			
	Kondhil Khe periode Ken	ā	Target	18	KOK			ď.	1008	12,00	12,00	1,00	12,00	3,00	0000	00'0	1,00	00'0				
		3023	Rp	17	1944	669 390 000				16,290,000	35,000,000	16.000.000	14,900,000	41,100,000	44,100,000	t.	\$00,000,000	-	7.108.000.000			
		2	target	16	200			70%	10001	a	а	-	a	4		-	#	15		1		
		2002	Rp	15		416.190.000				16.290,000	30,000,000	15.000.000	16,900,000	39 900 000	44.100.000		254,000,000		6.480.000.000			
	person	2	target	14	7,0%			100	100%	13	zı		22	0.		-	1					
	Target Kiverja Program dan Kerangka Pendanaan	1202	flp	13		344 380 000				16.290.000	20.200.000	12.200.000	12.906.000	38.708.000	44.100.000		200,000,000	+	6.164.000.000			
	verja Program	Q	target	13	9079			ž.	100K	а	a	-	2	m	Г		-					
The state of the s	Target Kir	2020	Вр	11		3.298.390.000				16.290.000	30,200,000	11.406.000	12.900.000	17.500.000		2 000 000 000	100 000 000	100.000.000	3.065.000.000			
		N	Target	30	10%	8	100			а	n	-	77	-	8	-		10.	差	100	92,68	73,00
		9002	No.			129.790.600				16.290.000	30.200.000	9.800.000	10.900.000	33,500,000	38,700,000		-		5.206.440.000			
		31	target	-	**	9	8			13	a	п	a		· ·	A			32	100	92,68	25,00
-	Kanasa	2018		7	ō	2	8			zı	a	0	13	ne	4	0	0	0	69,41	102,06	90,24	75,00
Data Canalan nada Tahun	Awai Perencanaan	2012	100	9	6,49%	8	0			n	a	1	п	ō	0	0	e	0	73.06	0	0	a
	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran-Program Conferenci Ideo	Kegistan (output)			Liju Pertumbuhan Bonomi Sektiv Pendagangan	Persentane Trodak Lanjar Hauli Temuan Barang Beredar yang tidak Senual SMI	Persentate uteu tembergen dan pertengkapannya (ATTP) yang bertanda tera sah.	Persentare alat utur tembangan dan perdengkapaneny (LTTP) yang bertanda tera sah tahus benjalan	Percentase Polain Usah Bislang Metrobagi Legal yang memerada Retertuan berlaku terbadap UTTP dan 80KT	waktu koteroedisan Pengawasan, pemantasan, monitoring don informasi hanga sembako (balan)	walts beteroodsan Pengawasan barseg beredir, barseg dan jara, barseg dalam kesadaan terbungkus (bulan)	Junfah ketersedaan penyalahan (kali)	walku ketersedaan pengawasa dan penertikan reklame (bulan)	Auriah Pelaksman Operasi Pasar (kak)	hanlah Pengawasan Alat Ultur Takar Tanbang dan perlengkapannya (UTTP) Dali)	herdah Perdangunan Gebung Metrologi (paket)	Jumbh Peraktan Remetrologi yang. Terseski (paket)	Lumbh Penta Fasa Retribusi Cemetrologi (1Penta)	Survey Kepustan Maryanabas Prebigangi terhadap Kenyananan Pasar (indeks)	Persentate beterundaan informati harpa Barang Poksk tlen Persting yang abusat	Persentase Palar Traditional yang dibangan	Persentate Pacar Traditional yang denystalisasi
	Program dan Registan		-			Program Perferbingen Komunen dan Pengamanan Perdopongan				Pengowaten, pementusian, monitoring dan informaci hanga sembako	dan dan	Penyukahan perlindangan Konsumen	Pengawakan dan penartiban reldame	Operasi pasar		Persbanguran Gedung Metrologi	Pengadaan Peraktan Standar Semetrologian		Program Pengenthangan Serana Distribusi Pendagangan			
	Rode			-																		
	Sasaran			-	Aersingkatrnya PDHS viktor Perdagangan																	
	Tujean			-	Meningkatlan PORS Meningkatnya PDHS Selbor Perdagnigan Settor Perdagangas																	

Pater Pater Percentor bonostari state sea	memorah kriteria lapak	Coefficien vortest fungs barang Rethoultan pokok	Penelihanan saran/prosaran widu keterselkan penelihanan sanar	catan Raperda Retribusi	Pengembangan dan pemingkatan jumlah pasar yang diperbaki (buah) pasar	Petakanan Peran Pasar Pasar Pasar sahitu	Revitational Pater Tradistorul Polatzanian Revitations Pater yang tenatruskin	Peerberühan Lingkoungan patan waktu ketersektaan Peerberühan Beerberühan casar Patani	Pemberuhan Drahnan Pasar wekku betersedian Pemberuhan desimas pasar Mulani	Pergenarun dan penertiban waktu betersedaan Pengananan dan anua	man Pasar Culmer	Perebuthan Surat Perjanjan Sewa Jumlah ketersetisan dadasse pasar Menyewa Teksyfilos/Murutg (surat)	Perdatasa Harga Barang Polosi. Jawlah Pendatasa Harga Barang dan Barang Pendang. Polosik dan Barang Pendag Ralil.	Persutabhiran Data Penjewa Aunkih Data Penyewa Toko/Nos/Los/Cos/ Toko/Kos/Los/Warang Warung yang ahasit (Data)	Program Promost dain Information Personalism James Product Lobal Vang	Secure har jati kabupaten jurish Koordinasi penyelenggarian Tapin		Program Peogenbargan Utaha Persentais Reformential Inn Utaha Destruments		Kontribus Settor Perdagangan Terhadas POSB	Persystem pedaging tecil juntah hetersedisan penyalahan selembah selembah sedisan selembah sedisan	ndesi tein usaha Ngan	dan pengendalan akehal	Pergovasan, mentoring dan jumlah Pengovasan mentoring dan erokusa berusahaan erakasi pengahaan kali		Sozializai SRD (prefat hetersediam pelakaniam condition talk (notae)	Monitoring dan pengpasasan SRG - Manharing dan pengawasan SRG	Pendatase Prockut Unggulen Auntah Ketersedian Data Produk Daerah Daerah Undukken Daerah	an Tehriis kepasta petaku	Socializasi STPP Bukan purlah ketersedaan STPP Bukan	Program Pelayanan Administrasi Personatasa urat kerja yang Penkasisian Penkasisian
	1		12	0	0	1	0	13	21	12		0	0	352	100	Ħ	1	100	100		#	348	CI.	a	CT.	-	77	0	0	0	80766
			15	0	0	a	0	12	12	21	1	285	69	R76	100	at .	2	1000	0		0	291	ō.	12	12	1	п	0	0		100
	THE PERSON NAMED IN		12 150.000	0	1 2300,000	0 150.000	0	12 1.045.900	12 275.240.	12 400.800.	1 48.250.000	1500 25.000.000	3300,000	1000 9.4501	100 270,400,000	1 100,000,000	2 170.400.000	100 368,650,000	100		34,000,000	300 300 35 000 000	32 \$8.000.000	12 28.650.000	12 223:000:000				4		100 1263,715,491
			000,000	4	1000.000	000'000'		.900.000	240,000 12	1200.000 12	900	1500		450.000 1000	0000	1000	9 0001	0000	300		0000	0000	0,000				+			100	0,491 200
			60,000,000	15,000,000	000 000 059			1,500,000,000	280,000,000		1 50 000 000	25.000.000		10.000.000	300,000,000	300,000,000	350.000.000	0 521.300.000	0		1 25.000.000	35,000,000	2 60.000.000	36,000,000	12 225 000 000	3 36.000.000	12 41,300,000	1 25.000.000	1 25,000,000	19 000 000	134075568
81.00%	Olympia	1,50%	75		an			12	73	13	11	1500	48	3000	0	-	u			3118	40	450	77	17	12	R	17	0	0	0	
			75.000.000		2,000,000,000	1,000,000,000	780.000.000	1500.000.000	290,000,000	420.000.000	20 000 000	30.000.000	7,000,000	12.000.000	300'000'006	100,000,000	200.000.000	451,000,000			25.000.000	40.000.000	000000009	30,000,000	225.000.000	36.000.600	35,000,000	7			1 420 463 461
#K.00%	- Landon	1,59%	ZI.	1	1 57	1 1	7	7 77	13	23	1	1500	44	1000	0	1	*			12%	1	0005	ä	ii ii	21	W	Ħ	4	7	1	
			90,000,00	90 000 000	2 000 000 000 000	10000001000	1.000.000.000	1 500 000 000	250.000.000	425.000.000	50,000,000	35,000,000	8.000.000	12.000.000	310,000,000	000 000 001	210.000.000	223,000,000			25.000.000	40.000.000	60,000,000	30.000.000	225.000.000	36.000.000	35,000,000	25.000.000	25.000.000	19,000,000	1.489.065.357
88 00%		1,40%	12 100.0		1 1.450.000.000	1 2,000,000,000	1.200.000.000	12 1,500,000,000	12 300.0	12 450.0	1 50.0	1500 15.0	48 30.0	1000	0 325	1 1001	6 225.0	456		12.50%	**	350 40	59	12 30	12 225	36	12 350	0	D	0	1,541,
100			TO 000 000 001							1 000 000 00	20/000/000	95,000,000 150		13.000.000 1.000,00	325,000,000	000 000 001	225.000.000	456,000,000		7	25.000.000	40,000,000	65.000.000	30.000,000 1	225,000,000	36.000.000	15,000,000	+			1.541,281,071
89.00%		1,40%	12,00 100,000,000	0000	1.00 1.450.000.000	1,00 2,000,000,000	0.00 1.200.000.000	12,00 1,500,000,000	12,00 300.000.000	12,00 450.000.000	1,00 50.000.000	1500,000 25,000,000		00'00 13.000'000	0,00 325,000,000	1,00	6,00 225,000,000	456.000.000		12.5%	1,00	550,000 40,000,000	12,00 65,000,000	12,00 30,000,000	12,00 225,000,000	3,000 36,000,000	12,00 35,000,000	00'0	90'0	00'0	1541383073

	recognise production and production							100		100		100		300,000	
	Persentace persenulus penguruan administrasi hepegawatan ASN							100		100		001		300,000	
Penyediaan Jina Komunikuni, sumbendasa ain dan Botok	waktu ketersedisan jasa telepan Batrik dan an dibalank	0	27	TI.	129.205.491	12	133.725.688	12	140.463.461	n	145,065,357	a	151.283.001	12,00	151.283.071
Penyedian Ava Administrasi Kesangan	Walto betersedium jara administrasi fersangan (Bulani	23	27	21	108.800.000	a	110 000 000	13	115,000,000	77	120,000,000	a	120.000,000	12,00	130,000,000
Penyedisan Alat Tulis Karbor		12	12	21	72.765.000	12	35.000.000	13	80,000,000	21	90,000,000	21	95,000,000	12.00	95,000,000
Premytelitran Barang ceruhan dan penggandaan		n	n	a	30,000,000	a	32.500,000	a	35,000,000	27	35,000,000	22	40.000.000	12,00	45 000 000
Perspection nakanan dan mineman	mátos hetersediaan konsumsi (Bulan)	a	17	n	85 000 000	22	96,000,000	22	87,000,000	17	89,000,000	22	90,000,000	12,00	90,000,000
Tapin Expo	fundah tersedianya Tapin Espo (begistan)	1	H	-	25,000,000	1	30,000,000	=	95.000.000	-	35.000.000	-	40,000,000	1,00	40,000,000
Rapat - rapat Koondinasi dan Konsultasi	Waltu ketersediaan Perjalanan Dinas (Bulan)	a	17	15	728.000.000	22	780,000,000	22	825.000.000	17	850.000.000	a	900,000,000	12,00	900.000.000
Persyndian Jasa Seberahan Kanton	waktu ketersetiaan jata petugan beberuhan kantor (Bulan)	77	12	12	000'009'09	CI CI	900 000 99	a	70,000,000	п	70,000,000	Zi.	70.000.000	12,00	70.000.000
Penyediash Jasa Keamanan Kantor	woktu ketersodisan jata Keamanan Bantor (Bulan)	32	12	12	14.400,000	22	16.000.000	Ct.	18.000.000	22	30,000,000	ā	20,000,000	12,00	20,000,000
Penyedian Konponen Instalns Ustrik/Pensrangan Banguran Kantor	Wattu keternedaan komponen Estrik (bulan)	0	CI .	13	10,000,000	13	12.500.000	22	15.000.000	22	15,000,000	a	15 000 000	12,00	15.000.000
Program Peringkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentane sarara dan prayacana aparater dalam kerdisi baik	89/09	arm.	100	355.300.000	100	417.500.000		900.000.000		710,000,000		695,000,000		455,000,000
	Persentase Aset Vang Tercatat				-			TOTAL .		1000		1000		-	
Portyediate Jose Perreibaran dan Pentirun Kondaran Diros / Operational	walfu beterredaan jasa kendaran dinus/operasional (bulan)	ZI .	77	27	77.300.000	21	75.000.000	a	90 000 000	15	P5.000.000	20	90,000,000	12,00	90,000,000
Perneliharaan Autin / Berkala Peralatan Insentaris Kantor	Waltu ketersedaan penelikuraan Peralatan kwentaris kantor (bulan)	TI.	13	175	15.000.000	72	17.500,000	77	20,000,000	12	30.000.000	a	25.000.000	12,00	25.000.000
Percelharam Bath/Berkala Gedang Kantor	Waltu Pemeliharaan Busin/Berkola gedung kantor (Balan)	77	17	12	203.000.000	21	75,000,000	a	75.000.000	22	80.000.000	77	000'000'58	12,000	10,000,000
Robabilitasi sedangi berat gedung kantor	wohts petaksanan rehabitasi sedang/herat geitung kantor (Registan)	0	0	0	+	-	156,000,000	п	100 000 000	"	400,000,000	-	200,000,000	1,000	200,000,000
Pengadaan Perlengkapan dan Pendatan Gedung Cantor	fumlish pengadian perlengkapan getiong kantor (Unit)	a	ah .	1	60.000.000	21	100 000 000	п	125,000,000	12	125.000.000	10	100,000,000	10/00	100,000,000
Program Peningkatan Penjembangan Subern Pelapora Capalan Rinerja dan Nesangan	-	100	001	100	15,900,000	001	17,000,000		18.500.000		31,000,000		21.000.000		21,000,000
	Nébil SAKIP Diess Perdagangan							88		A		٧		<	
Penyscantar Laponan Capalan Kinerja dan ilihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Aumlich Retersodisan laperon capsisan das Rhitsar realisasi kinerja (Japozae)	01	10	30	10.400.000	10	11,000,000	91	12.500.000	9	15,000,000	2	15.000.000	10,00	15.000.000
Pergustan Pelaporan Kesangai Kesangan Baserah	Aurilah keter sedisan laparan h besandan Baserani	7	PA	20	5.500.000	Pi .	000'000'9	24	6.000,000	3	6.000.000	74	6,000,000	2,00	6.000.000

Indikator Kinerja Perangkat Daerah

			REN	RENSTRA						
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	AWAL		TARGET KIN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	/SASARAN	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	2	3	4	2	9	7	00	0	10	11
-	Meningkatkan pelayanan sekretariat	Meningkatnya penyediaan Indeks Kepuasan Pegadministrasi perkantoran, sarana terhadap pelayanan prasarana aparatur dan laporan sekretariat kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat			27	78	79	08	81
7	Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	6,49%		%6	10%	%9	7%	%8